



Kearifan Lokal Pengelolaan Keuangan Masyarakat Penerima Ganti Rugi Lahan YIA

Chiquitha Tiara Fithiadi Sedjati
Qonita Luthfia Alimah
Langit Gemintang Muhammad Hartono
Salsabila Nur Aini
Malik Anwar
Derajad Sulisty Widhyharto

Artikel dikirim: Minggu, 19 September 2021
Revisi dikirim: Sabtu, 4 Desember 2021

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana kearifan lokal memainkan peran dalam keputusan ekonomi masyarakat dan bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam literasi keuangan melalui pendekatan kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan mendalam dari sudut pandang subjek terhadap suatu fenomena. Hasil penelitian adalah (1) kearifan lokal masih berperan penting dalam keputusan ekonomi masyarakat. Nilai gemi, nastiti, dan ngati-ngati serta nilai tuna satak bathi sanak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (2) Mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam literasi keuangan bukan berarti semata-mata mengikuti nalar masyarakat, tetapi berusaha untuk berusaha untuk menyelaraskan nilai tersebut dengan prinsip ekonomi.

Kata Kunci: literasi keuangan, kearifan lokal, ketertanaman, pendekatan kontekstual

Abstract

This paper aims to see how local wisdom plays a role in people's economic decisions and how local wisdom can be integrated into financial literacy through contextual approach. This research used a descriptive qualitative approach in order to gain in-depth insights of the phenomenon from the subjects' point of view. The results of this study are (1) local wisdom still plays an important role in people's economic decisions. Gemi, nastiti, ngati-ati values and tuna satak bathi sanak philosophy are ones found in people's daily lives. (2) Integrating local wisdom to financial literacy does not necessarily mean blindly following people's values, but rather trying to align said values with economic principles.

Keywords: financial literacy, local wisdom, embeddedness, contextual approach



Pendahuluan

Dalam era disrupsi saat ini, kearifan lokal dan praktik pengelolaan keuangan termasuk aspek yang turut terdisrupsi secara signifikan. Hal ini terlihat praktik aspek tersebut terkonversi ke banyak aplikasi dan *platform digital*. Pertanyaannya kemudian adalah apakah benar aspek tersebut mengalami gradasi ruang dari *offline* menjadi *online*, atau sebaliknya dalam praktiknya menunjukkan kegagalan dan keberhasilan beradaptasi? Kebutuhan pengelolaan keuangan (literasi keuangan) menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, mutlak akan menuntun setiap orang lebih optimal menggunakan instrumen-instrumen serta produk-produk keuangan yang tepat. Di Indonesia sendiri kurangnya pengetahuan akan literasi keuangan menjadi masalah serius dan menjadi salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Nasional Ketiga (SNLINK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan di Indonesia mencapai 38,03%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 8,33% dari 29,7% di tahun 2016. Sementara itu, dalam survei yang dilakukan oleh OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy (2020), Indonesia menempati peringkat 6 dari 26 negara yang disurvei. Pada survei tersebut, Indonesia memiliki skor sebanyak 13.3. Sementara itu, skor tertinggi adalah 14.8 dari Tiongkok/Hongkong dan skor terendah 11.1 yang dipegang oleh Italia—Malta dan Thailand masing-masing berada di bawah Italia, namun data mereka tidak memadai pada survei di tahun tersebut sehingga skor literasi keuangan actual tidak dapat ditentukan.

Walaupun data OECD/INFE tersebut menunjukkan skor tingkat literasi keuangan yang relatif tinggi pada Indonesia dibanding negara peserta lainnya, nyatanya seluruh negara dunia masih tergolong memiliki tingkat yang rendah—sekalipun pada negara perekonomian maju (Lusardi 2019). Di sisi lain, data survei SNLINK OJK pun memperlihatkan ketimpangan tingkat literasi keuangan antara desa dan kota, masing-masing sebesar 34,5% dan 41,4%. Ketimpangan ini disebabkan karena adanya perbedaan akses keterjangkauan informasi antara desa dan kota (Elisabeth 2021).



Memiliki literasi keuangan yang baik merupakan salah satu pilar yang penting untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera (Yushita 2017).

Isu literasi keuangan menjadi menarik untuk dibahas dalam konteks masyarakat penerima ganti rugi pembebasan lahan. Berkaca dari kasus-kasus terdahulu, banyak proyek pembangunan yang tidak berhasil mengantisipasi kemungkinan adanya masalah pengelolaan uang yang dihadapi masyarakat ketika menerima uang ganti rugi. Ketidaksiapan ini juga salah satunya dipicu rencana pembangunan yang kerap terkesan buru-buru dan belum direncanakan secara matang dengan alasan kepentingan bisnis kelompok tertentu. Jauh sebelum Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dibangun, Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat adalah contoh awal. Pada saat Bandara Kertajati dibangun warga sekitar yang awalnya menolak lahannya digunakan untuk pembangunan bandara. Ada banyak kontroversi yang menyelimuti pembangunan bandara, seperti pembangunan yang dianggap melanggar UU dan juga adanya penolakan dari masyarakat. Puncak dari penolakan ini adalah munculnya tindakan represif dari aparat terhadap masyarakat.

Kejadian serupa kembali terulang pada pembangunan Bandara YIA. Kabar pembangunan bandara ditolak oleh banyak masyarakat dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena lahan tersebut adalah mata pencaharian mereka. Proses pembangunan pun tidak lepas dari berbagai masalah, mulai dari prosesnya yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif dan juga pembangunan yang dianggap melanggar UU dan juga tidak pernah tercantum dalam rencana pembangunan daerah.

Studi terdahulu telah membahas isu kesejahteraan yang muncul pada warga pascapembebasan lahan YIA, yaitu dampak sosial-ekonomi pada kehidupan masyarakat pasca-pembebasan lahan YIA (Az-Zahra 2019 & Susanto 2020). Penelitian sebelumnya belum menunjukkan kajian lebih mendalam terhadap aspek spesifik warga pascapembebasan lahan YIA dewasa ini, yaitu mengungkap bagaimana literasi keuangan dilakukan oleh warga pascapembebasan lahan dan interaksi literasi keuangan tersebut dengan pengaruh budaya yang melekat pada masyarakat sedari dulu serta apakah aspek literasi keuangan ini ikut berkontribusi pada masalah kesejahteraan masyarakat



pascapembebasan lahan. Mengingat pentingnya literasi keuangan, maka sudah seharusnya semua bagian masyarakat melek literasi keuangan. Di sinilah pentingnya pendekatan kontekstual melalui literasi keuangan berpegang literasi keuangan supaya keberlanjutan hidup masyarakat pascapembebasan lahan terjaga.

Berangkat dari masalah ini, penelitian ini fokus pada celah antara edukasi keuangan modern yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dengan kondisi masyarakat pascapembebasan lahan yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana pengaruh nilai-nilai kearifan lokal dalam tindakan ekonomi masyarakat penerima ganti rugi Bandara YIA.

Tujuan Penelitian

Belum ada penelitian sebelumnya terkait masyarakat pascapembebasan lahan YIA yang mencoba mengungkap bagaimana nilai kearifan lokal tercermin dalam tindakan ekonomi masyarakat, terutama dalam pengelolaan uang pembebasan lahan. Dengan begitu, penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan yang belum dijamah oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terkait literasi keuangan dan interseksinya dengan kebudayaan masyarakat memberikan pemahaman tentang bagaimana masyarakat pascapembebasan lahan berusaha mempertahankan kehidupannya sekaligus melihat bagaimana budaya menjadi kearifan lokal yang mempengaruhi pandangan hidup mereka berkaitan bagaimana masyarakat mengelola keuangannya.

Metode

Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif yang ditujukan agar dapat berfokus pada keunikan yang ada pada setiap manusia atau realita sosial yang tidak dapat dianalisis secara statistik (Mulyadi 2011). Studi kasus dipilih sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian ini karena terdapat batasan waktu, tempat, kasus, serta individu tertentu. Maka, penelitian ini akan berfokus untuk menggali informasi lebih dalam di dalam batasan tersebut. Berdasarkan Yin (2003), penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan studi kasus tunggal (*single case study design*) dengan menggunakan satu unit



analisis dan satu konteks kasus dalam menjelaskan suatu isu yang dikaji secara holistik. Unit analisis yang digunakan adalah individu yang ada di dalam rumah tangga penerima ganti rugi pembebasan lahan YIA dan isu yang dialami adalah tindakan ekonomi yang mereka lakukan dengan uang ganti rugi yang didapatkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi literatur, dan juga wawancara mendalam. Data primer dalam penelitian ini berasal dari informan yang diwawancarai dengan pedoman semi terstruktur. Informan terdiri dari delapan orang dengan rincian yaitu lima masyarakat Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo yang terdampak pembebasan lahan YIA, seorang pakar di bidang advokasi sosial, seorang pakar kebudayaan Jawa, serta seorang akademisi di bidang sosiologi budaya dan advokasi sosial. Kegiatan observasi dilakukan di perumahan masyarakat yang terdampak pengusuran lahan YIA yang ditujukan untuk melihat pola-pola konsumsi masyarakat seperti luas lahan rumah dan bentuk dari rumah tersebut, jumlah mobil yang dimiliki, dan lain sebagainya.

Analisis data dengan menggunakan pendekatan studi kasus dimulai dengan melakukan deskripsi secara terperinci mengenai kasus pembebasan lahan YIA meliputi di dalamnya tindakan ekonomi dari penggunaan uang pembebasan lahan YIA, nilai-nilai dan kearifan lokal yang menjadi pedoman atas tindakan ekonomi yang terjadi, hingga dampak sosial dan ekonomi dari pembebasan lahan YIA tersebut bagi masyarakat Temon. Data yang telah didapatkan dikategorikan berdasarkan isu yang telah ditentukan dalam penelitian ini yang selanjutnya akan diinterpretasikan dan dibaca secara langsung menggunakan teori yang dipilih sebelumnya. Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data.

Pendekatan dan Diskusi Teori

Pembangunan infrastruktur yang masif telah mengubah fungsi uang yang tak hanya mempunyai fungsi alat tukar semata, melainkan uang memiliki fungsi sosial simbolis. Hal ini tercermin dalam tindakan ekonomi yang pada dasarnya adalah tindakan sosial dan lembaga ekonomi terkonstruksi secara sosial. Maka dari itu, tindakan ekonomi tidak



dapat dilepaskan dari analisis terhadap aspek sosial yang mempengaruhinya. Menurut Granovetter (1985), tindakan ekonomi tidak dapat dipandang semata sebagai tindakan utilitarian rasional manusia (*undersocialized*) seperti dalam ilmu ekonomi klasik dan neoklasik—atau sebagai tindakan manusia yang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial termasuk budaya, nilai, dan norma (*oversocialized*)—seperti dalam ilmu ekonomi reformis dan sosiologi. Kedua perspektif tersebut berada di dua kutub ekstrim untuk menjelaskan tindakan ekonomi masyarakat. Tidak ada motif murni seseorang melakukan tindakan ekonomi karena relasi sosial turut mempengaruhi tindakan ekonomi sehingga motivasi menjadi *multipurpose* dan tercampur-aduk antara tujuan rasional dengan sosial (Blikololong 2012). Maka dari itu, Granovetter mengenalkan konsep *embeddedness* sebagai jalan tengah dalam memandang hubungan tindakan ekonomi dan struktur sosial masyarakat.

Meskipun muncul pesimisme dari penganut pemikiran awal *embeddedness* yang menganggap konsep tersebut mengalami stagnasi dan di prediksi tidak lagi berkembang (Granovetter, M. Sweberg R 1992). Akan tetapi dalam praktiknya, konsep *embeddedness* masih bisa ditemui perkembangannya di masyarakat khususnya di negara berkembang yang sedang antusias melakukan pembangunan infrastruktur. Terlihat dalam bentuk perilaku ekonomi masyarakat memiliki interseksi antara tindakan rasional dan tindakan yang dipengaruhi struktur sosial secara situasional. Pengaruh struktur sosial ini terjadi pada nilai-nilai yang dianut oleh para individu dalam suatu masyarakat. Interseksi tersebut terjadi dalam jaringan hubungan interpersonal (Granovetter 1985). Dengan kata lain, pilihan perilaku ekonomi yang dilakukan antara bersikap rasional atau mengikuti nilai yang terkondisikan dalam struktur sosial melalui hubungan interpersonal bertautan dengan konteks situasi tertentu.

Sebagai contoh, seorang pedagang akan menjual barang dagangannya dengan harga normal kepada para pelanggan yang ia tidak kenal. Akan tetapi, ia akan menjual barang dagangannya lebih murah ketika yang membeli adalah saudara dekatnya. Dari contoh tersebut, perilaku ekonomi pedagang tersebut berada dalam interseksi antara rasionalitas dan tindakan yang dipengaruhi oleh nilai tergantung dengan siapa ia



berinteraksi dalam tindakan ekonomi yang terjadi. Ketika menjual barangnya pada pelanggan yang tidak ia kenal, si pedagang merasa pelanggan tidak memiliki kedekatan emosional dengannya sehingga ia memilih tindakan rasional berdimensi *self-interest* untuk memaksimalkan profit. Sebaliknya, ia meninggalkan perilaku rasional tersebut dengan menunjukkan perilaku yang dipengaruhi oleh nilai kekerabatan ketika berhadapan dengan seorang saudara. Maka dari itu, *embeddedness* Granovetter melihat tindakan ekonomi berada di antara aspek rasionalitas dan nilai sosial yang selalu berinterseksi serta tidak dapat dianalisis dengan condong pada salah satu aspek saja.

Berkaitan dengan literasi keuangan, jenis literasi ini seringkali dikaitkan dengan dimensi rasional tindakan ekonomi yang terjadi terutama pada masyarakat kapitalistik. Ia lebih dikenal sebagai pengetahuan individu terhadap cara mengelola keuangan dengan baik, seperti melakukan perhitungan dalam penganggaran, pengeluaran, pemasukan, investasi, dan target tabungan. Akan tetapi, literasi keuangan tidak dapat sepenuhnya bersifat rasional karena faktor *embeddedness* yang telah dijelaskan di atas. Dengan kata lain, pemahaman dan praktek literasi keuangan tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial-budaya suatu masyarakat.

Seseorang dapat bertindak rasional dengan membelanjakan uangnya untuk membeli kebutuhan dan menganggarkan dana yang lain untuk investasi. Namun, karena nilai masyarakat mengajarkan ia untuk menyumbangkan sebagian rezekinya kepada tetangga yang baru saja ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya, maka ia mengubah susunan anggaran yang sudah ditetapkan dengan mengeluarkan sebagian dana untuk disumbangkan. Tindakan menyumbang itu bukan tindakan rasional yang menguntungkan si pemilik dana. Sebaliknya, dana yang disumbangkan sama sekali tidak memberikan keuntungan keuangan bagi dirinya. Dengan kata lain, ia merugi jika dilihat dari segi tindakan ekonomi rasional. Walaupun begitu, ia mengalami semacam kepuasan karena telah melakukan tindakan yang dihargai oleh nilai dalam masyarakat. Ia pun merasa tidak rugi walaupun secara keuangan ia merugi. Dari contoh tersebut, terlihat bagaimana *embeddedness* mempengaruhi praktik literasi keuangan seseorang. Maka dari itu, bagaimana seseorang memahami dan menerapkan literasi keuangan tidak dapat



lepas dari aksi yang terkondisikan oleh struktur sosial-budaya pada masyarakat tempat ia hidup.

Karena literasi keuangan *embedded* dengan struktur sosial-budaya suatu masyarakat, maka kearifan lokal (*local wisdom*) yang inheren dalam sistem kebudayaan turut pula mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan literasi keuangan. Menurut Gobyah dalam Sartini (2004), kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah dan kearifan lokal diperoleh melalui pengalaman masyarakat dalam suatu kelompok tertentu (Rahyono, dalam Fajarini 2014) sehingga tercipta nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup (*way of life*). Berhubungan dengan literasi keuangan, kearifan lokal memberikan suatu masyarakat pandangan dunia yang khas tentang bagaimana mereka melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari alih-alih bersikap rasional semata. Dengan kata lain, kearifan lokal juga mengandung nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan ekonomi masyarakat. Hal inilah yang terangkum dalam konsep *embeddedness* milik Granovetter: tindakan ekonomi rasional berinterseksi dengan tindakan ekonomi yang dipengaruhi oleh nilai dan norma dalam kearifan lokal masyarakat.

Temuan dan Pembahasan

Setiap budaya pasti memiliki kearifan lokal masing-masing yang digunakan sebagai pedoman atau panduan hidup sehari-hari bagi masyarakatnya. Sama halnya dalam budaya Jawa, ada banyak tuturan atau nilai yang membantu masyarakat untuk melaksanakan aspek dari kehidupan sehari-hari. nilai ini diajarkan dan diturunkan secara turun-temurun antargenerasi. nilai-nilai tersebut tidak terbatas hanya pada kehidupan sosial maupun spiritual, tetapi juga dalam aspek-aspek lain, seperti keuangan. Beberapa di antara tuturan tersebut yang sarat akan nilai-nilai keuangan adalah *gemi, nastiti, ngati-ati* dan *tuna satak bathi sanak*.



Gemi, Nastiti, dan Ngati-ati

Meskipun sering dituturkan sebagai sebuah frasa, *gemi, nastiti, dan ngati-ati* memiliki artinya masing-masing. *Gemi* berarti hemat dan cermat; *nastiti* diartikan sebagai teliti; dan *ngati-ati* berarti hati-hati. Dalam konteks keuangan, maka tuturan ini dapat diterjemahkan sebagai pandai berhemat atau cermat dalam mengatur keuangan, teliti agar tidak mengalami kerugian, dan juga berhati-hati dalam mengelola uang (Pitoyo 2008).

Dalam kearifan lokal masyarakat Jawa, nilai *gemi, nastiti, dan ngati-ati* ini terkandung dalam cerita wayang *Mbangun Candi Sapta Arga* (Membangun Candi Sapta Arga) (Widyastuti 2007). Dalam cerita ini, dikisahkan Dewi Mustakaweni pergi ke Amarta untuk mencuri Jamus Kalimasada dengan cara berpura-pura menjadi Raden Gatotkaca. Setelah berhasil masuk ke dalam *kedhaton* Amarta, Dewi Mustakaweni kemudian berhasil menipu Dewi Drupadi untuk memberikan Jamus Kalimasada. Tetapi, tidak lama kemudian penyamarannya terbongkar sehingga ia dikejar oleh Srikandi di *Paseban Jawi*. Pengejaran ini berakhir dengan Dewi Mustakaweni melepaskan panah Hardha Dhedhali lalu kemudian terbang ke angkasa. Meskipun berhasil kabur, akhirnya Dewi Mustakaweni berhasil dikalahkan oleh Priyambada setelah Srikandi meminta pertolongan padanya. Jamus Kalimasada diberikan kepada Priyambada dan Dewi Mustakaweni diperistri oleh Priyambada. Dalam cerita *Mbangun Candi Sapta Arga*, Jamus Kalimasada menjadi simbol kemakmuran sehingga peran Srikandi dalam cerita ini menjelaskan secara tersirat nilai *gemi, nastiti, dan ngati-ati* yang lekat dengan kehidupan sehari-hari perempuan Jawa.

Nilai *gemi, nastiti, dan ngati-ngati* juga ditemukan dalam Serat Darmalaksita yang juga disebut *Asta Gina* berupa delapan keutamaan yang penting sebagai ajaran dari Mangkunegara IV (Pitoyo 2008). Pun nilai tersebut juga menjadi salah satu penekanan kewajiban bagi wanita yang sudah menikah dalam Serat Nitimani, karya sastra yang membahas ajaran seksologi dan peran istri dalam rumah tangga (Insani 2018). Tidak jauh berbeda dari isi tersirat dari peran Srikandi, seorang istri harus melaksanakan kewajiban yang terdiri dari tiga pangkat dengan masing-masing memiliki tiga jenis sifat. Keharusan



memiliki sifat *gemi*, *nastiti*, dan *ngati-ngati* muncul sebagai pangkat pertama. *Gemi* yang berarti tidak boros, maka seorang istri harus pandai berhemat dalam mengelola nafkah dari suami agar keberlangsungan ekonomi keluarga tetap berjalan. Belanja kebutuhan rumah tangga tidak boleh mementingkan nafsu belaka dan memerhatikan porsi yang dibutuhkan. Hal ini diharapkan agar jika terjadi suatu hal di luar dugaan, masih ada nafkah tersisa untuk menangani masalah yang muncul. *Nastiti*, selain berarti teliti, dapat diartikan juga sebagai tidak menyepelekan suatu urusan. Akibat dari menyepelekan hal-hal yang dianggap remeh dapat berakibat fatal hingga menggoyahkan hubungan rumah tangga. Dalam konteks ini, keuangan merupakan hal krusial dalam mengarungi rumah tangga sehingga ketelitian dan kemampuan berpikir bijak untuk selalu menimbang setiap tindakan merupakan sifat penting bagi istri. Terakhir, *ngati-ngati* atau hati-hati, tidak memberi ruang untuk kesalahan. Bukan hanya selalu waspada demi keselamatan jiwa dan rasa seorang suami, istri harus hati-hati dalam memegang uang keluarga. Sehingga, dalam tafsiran lain, *gemi*, *nastiti*, dan *ngati-ati* ini berkaitan erat dengan peran istri sebagai ekonom dalam keluarga yang harus mengelola pendapatan keluarga.

Tuna Satak Bathi Sanak

Selain *gemi*, *nastiti*, dan *ngati-ati*, ada juga nilai *tuna satak bathi sanak*. *Tuna* artinya rugi dan kata *satak*, berasal dari *sa-etak*, artinya satu etak. *Etak* dikenal sebagai satuan mata uang di masa pra-kemerdekaan yang senilai dengan 100 *dhuwit*. *Dhuwit* merupakan satuan terendah dalam sistem mata uang di zaman penjajahan (Pitoyo 2008). Secara sederhana, *tuna satak bathi sanak* dapat diterjemahkan sebagai “rugi sedikit tidak apa-apa, asal dapat saudara”. Dalam penafsirannya, nilai ini dapat dimaknai menunjukkan suatu bentuk keharmonisan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Pentingnya keharmonisan dalam masyarakat Jawa juga ditunjukkan melalui kata ‘masyarakat’ yang disebut dengan “*bebrayan agung*” yang dapat diterjemahkan menjadi “keluarga besar” (Pitoyo 2008). Melalui nilai *tuna satak bathi sanak*, dapat dilihat bagaimana budaya Jawa sangat kental akan budaya gotong-royong dan membantu sesama. Masyarakat Jawa menganggap dengan jumlah saudara dan kerabat yang banyak akan mempermudah



segala urusan dan kesulitan. Bila ada anggota yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan, maka anggota masyarakat lain harus saling meringankan. Dalam hal materi, nilai ini menekankan keselarasan dalam hubungan sosial sehingga harta yang berlimpah tidak ada artinya bila manusia kehilangan martabatnya sebagai seorang yang baik, dermawan, dan menjaga persaudaraan. Prinsip menjaga kerukunan ini kemudian berimbans sebagai motivasi kuat untuk menghindari konflik agar tidak terjadi pertengkaran antarsaudara yang dapat berakibat pada menjauhnya rezeki (Nawawi 2012). Jika dikaitkan dengan keuangan, kelebihan rezeki atau uang bukanlah hal utama yang dicari sehingga kegiatan membagikan atau meminjamkan uang kepada kerabat atau tetangga bukan suatu hal asing. Mengutip dari ahli budaya yang diwawancarai, Irfan Afifi (2021), mengatakan bahwa prinsip ekonomi sejalan dengan relasi dan moral—jika kelebihan maka dibagikan dalam berbagai bentuk. *Tuna satak bathi sanak* tercermin dalam keengganan untuk menumpuk uang agar tetap dapat menjalin relasi dengan kerabat. Dari sinilah, keuntungan keuangan atau akumulasi modal semata tidak menjadi prioritas utama, melainkan prioritas utama akan selalu berkaitan dengan relasi sosial masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur Bandara dan Masyarakat

Pembangunan YIA sedari awal sudah menerima penolakan, pun melanggar regulasi. Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam penataan ruang adalah kondisi fisik Indonesia yang rawan bencana; dibangun untuk kemakmuran rakyat; dan menghormati hak yang dimiliki orang lain—sesuai isi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Ini artinya, pembangunan tidak boleh melupakan kondisi Indonesia yang tidak bisa lepas dari bencana dan dibangun atas kepentingan rakyat tanpa mengabaikan hak masyarakat. Menengok isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2023, dijelaskan bahwa kawasan pantai selatan, terutama daerah Temon merupakan rawan bencana tsunami sekaligus berfungsi sebagai kawasan lindung geologi. Dikeluarkannya Izin Penetapan Lokasi bandara ini semakin



dipertanyakan pula jika melihat Pasal 26 ayat (2) dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Jawa-Bali bahwa fungsi Bandar Udara Adisutjipto dimantapkan fungsinya dengan Bandar Udara Adi Sumarmo melalui integrasi sebagai satu kesatuan—bukan membangun bandara baru. Yogi Zul Fadhli (2021) dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang mendampingi advokasi masyarakat terdampak menyampaikan pembangunan bandara tersebut tidak hanya melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, tetapi juga Hak Asasi Manusia dengan hilangnya tanah bagi para petani untuk keberlanjutan kerja mereka. Selain itu, pembangunan bandara juga melanggar penerimaan ganti rugi untuk masyarakat terdampak yang seharusnya dilaksanakan musyawarah dua arah. Salah satu narasumber dari masyarakat penerima ganti rugi yang bekerja sebagai buruh mengeluhkan harga tanah ditentukan secara sepihak. Dirinya diberi surat pembelian tanah dan diminta tanda tangan. Terdapat narasumber lain yang sebelumnya bekerja sebagai petani kehilangan pekerjaan lantaran uang ganti rugi tidak cukup untuk membeli lahan baru. Tanah yang dirampas membuatnya terpaksa menjadi buruh bangunan—kenyataan rupanya berbeda dengan janji akan ada pekerjaan diterima masyarakat terdampak merupakan hasil dari melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa pelaksanaan pengadaan tanah seharusnya meliputi musyawarah kedua pihak dalam bentuk yang disetujui bersama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat sekitar tidak menerima pembangunan bandara, bahkan sejak awal mula wacana hingga saat ini dilihat dari kondisi mereka.

Perencanaan yang tidak matang kemudian berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa pembangunan bandara. Mereka yang tergusur dari lahannya kemudian harus mencari mata pencaharian lain, sebab uang ganti rugi yang diterima tidak cukup untuk membeli lahan tani lagi. Selain itu, banyak masyarakat yang juga menerima relokasi di daerah lain yang tidak ada lahan pertanian,



sehingga berganti profesi dengan membuka toko kelontong atau merintis usaha lain seperti rental mobil ataupun salon.

"Itu kalau kita hitung, kita kena gusur, itu gak mencukupi mbak. Karena harga tanah, apalagi sekitar bandara, itu langsung naik drastis. Kalau dulu gusuran cuma kena 500, sekarang sudah 2 kali lipat. Jadi sudah tidak mencukupi. Saya ya sekarang sudah tidak bertani, gak ada lahan. Jadi kita sekarang pekerjaannya jadi buruh."

"Dulu sempat kepikiran untuk buka warung, tetapi tetangga udah banyak yang buka warung juga."

Sayangnya, perubahan mata pencaharian ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak masyarakat yang justru tidak semakin makin makmur karena mata pencaharian barunya tidak berhasil memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak seperti ketika mereka bekerja sebagai petani. Ketiadaan lahan juga membuat pengeluaran masyarakat meningkat. Hasil lahan yang pada awalnya tidak hanya dijual tetapi dapat juga digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, sekarang tidak ada lagi. Dari sana, masyarakat harus membeli bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Karena lahan pertanian itu kan biasa kita tanam macem-macem: ini cabai sebelahnya ada sayuran. Kalau sekarang kan sudah tidak tanem sayur-sayuran, gak bisa tanam yang pokoknya apa. Jadi pengeluaran itu jelas meningkat."

Nilai Kearifan Lokal dalam Tindakan Ekonomi Masyarakat

Meskipun digempur oleh modernisasi, nilai-nilai di atas masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat Jawa di Kecamatan, Kulon Progo. Hal ini ditunjukkan melalui bagaimana mereka mengelola uang ganti rugi pembebasan lahan proyek YIA. nilai-nilai budaya Jawa masih melekat erat pada tindakan-tindakan ekonomi yang dibuat. Hal ini terjadi karena pada dasarnya, masyarakat masihlah berada dalam fase transisi dari pola pikir dengan prinsip-prinsip tradisional menuju pola pikir dengan prinsip-prinsip modern. Mengutip dari Boeke (dalam Sadli 1971) mengenai ekonomi dualistik bahwa "dualisme sosial adalah benturan sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial dari



ragam lain” dengan kapitalisme menjadi sistem sosial paling sering diimpor. Dikarenakan setiap sistem sosial memiliki karakteristik sendiri, terjadi pertentangan antara dua sistem dengan perbedaan nilai dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang diambil tidaklah dapat sepenuhnya rasional dalam ekonomi modern sebab masih ada nilai-nilai dan nalar tradisional yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Secara umum, alokasi utama uang ganti rugi pembebasan lahan dimanfaatkan masyarakat ke dalam empat elemen utama, yaitu (1) relokasi diri dan keluarga dengan cara membeli rumah atau tanah; (2) menyambung mata pencaharian dengan cara membeli lahan sawah/kebun atau kios untuk membuka usaha; (3) dipinjamkan atau dibagikan kepada keluarga; dan (4) ditabung dalam bentuk deposito. Dari empat elemen utama tersebut, dapat diamati bagaimana nilai-nilai Jawa masih kental dan turut mempengaruhi tindakan ekonomi masyarakat.

Pertama, pentingnya keharmonisan dalam masyarakat ditunjukkan melalui tindakan meminjamkan atau memberikan uang kepada keluarga. Senada dengan nilai *tuna satak bathi sanak*, relasi sosial menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat daripada akumulasi modal atau keuntungan semata. Dalam reportase Maharani (2020), seorang masyarakat mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp2 miliar. Uang tersebut kemudian ia gunakan untuk membeli lahan relokasi senilai Rp100 juta dan juga untuk merintis usaha rental. Uang tersebut kemudian juga ia bagi dengan enam anggota keluarga hingga habis.

Kisah serupa juga datang dari salah satu narasumber yang diwawancarai; lahan seluas 3.500 meter persegi dibebaskan dengan uang ganti rugi kurang lebih Rp2 miliar. Uang tersebut kemudian ia bagi dengan enam saudaranya sehingga uang yang ia dapat hanya sekitar Rp300 juta. Sementara itu, terdapat juga narasumber lain yang menyisihkan sebagian dari uang yang tidak didepositokan untuk dipinjamkan kepada saudara. Selain itu, nilai yang lebih mementingkan keharmonisan dalam masyarakat dan gotong-royong daripada akumulasi modal semata juga tercermin dari bagaimana masyarakat berbagi dengan tetangganya, seperti kutipan wawancara berikut ini:



"[...] kalau abis ambil bagi hasil [deposito] suka dibagi-bagiin ke tetangga yang kurang beruntung."

Sementara berbagi kepada tetangga menjadi suatu hal yang sering dilakukan, investasi dalam bentuk deposito justru hanya dilakukan sekali, yaitu saat pertama kali mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan. Hasil dari uang deposito pun dirasa cukup karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kedua, hemat dan cermat dalam mengatur pengeluaran; *gemi*. Selain *tuna satak bathi sanak*, *gemi* juga menjadi salah satu nilai yang kerap ditemukan dalam masyarakat. Meskipun memiliki uang tabungan atau deposito dalam jumlah besar, tetapi banyak masyarakat yang mempertahankan pola konsumsinya tetap sederhana seperti dahulu, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

"Kalau [beli] barang tersier dari tahun 2017 semenjak terima ganti rugi bisa dihitung kak, cuma motor, kulkas, tv, wifi aja. Dan di rumah motor satu buat [kendaraan] aku ke kampus. [...] Walaupun sekarang aku juga tetep nabung dulu sih kalau butuh barang tersier. Cuman ya itu tadi untuk kebutuhan yang bener-bener urgent bisa langsung terpenuhi."

Dalam wawancara, narasumber menjelaskan bahwa pola konsumsinya tidak berubah meskipun sekarang keluarganya memiliki cukup uang. Uang tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan primer seperti kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan sekolah atau kuliah. Sementara itu, untuk kebutuhan tersier atau mewah, mereka masih diajarkan untuk menabung dahulu. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa cermat dalam mengatur pengeluaran. Terlepas dari kemampuan keuangan, mereka masih menerapkan nilai *gemi* dalam mengatur pengeluarannya.

"Dari segi pengeluaran ya ga dipungkiri lagi pasti meningkat dibanding dulu. Kalau dulu lebih sedikit karena emang adanya segitu, kalau sekarang ya mau beli hal yang lain, bisa. Dengan pertimbangan yang sekiranya masuk akal dan memang dibutuhkan. Bukan berarti yang jor-joran, yang bener-bener dibutuhkan aja. Contohnya material bangunan buat benerin kandang, motor untuk kendaraan karena sebelumnya motornya rusak gak bisa dipake."



Selain menerapkan nilai *gemi*, nilai *nastiti* juga masih tercermin dalam pengelolaan uang masyarakat. Uang ganti rugi yang diterima menjadi “saldo” untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yang secara langsung membuat pengeluaran terasa meningkat. Akan tetapi, pengeluaran ini tidaklah sepenuhnya pengeluaran yang konsumtif, melainkan produktif. Uang ganti rugi yang diterima dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan utama maupun yang tidak terlalu diprioritaskan, tanpa perlu menunggu uang terkumpul. *Nastiti* dan *ngati-ngati* juga diperlihatkan oleh salah satu narasumber yang menyampaikan uang hasil ganti rugi digunakan untuk biaya kuliah anaknya. Keputusan ini diambil dikarenakan setelah kehilangan lahan yang bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga berdikari makanan pokok sehari-hari. Mempertimbangkan uang ganti rugi tidak begitu banyak karena sudah dibagi dengan kerabat, ia menggunakan uang tersebut sebagai kelangsungan masa depan anaknya, sementara kehidupan sehari-hari menggunakan hasil uang buruh. Terdapat prioritas yang diambil oleh narasumber setelah menyadari ia tidak bisa mengandalkan uang hasil pembebasan lahan.

“Uang segitu ya sebenarnya nggak cukup. Anak dua. Biayanya banyak juga. Uang disimpan untuk biaya kuliah, kalo uang makan ya pake buruh. [...] Lebih baik disimpan untuk biaya anak-anak.”

Tindakan ekonomi masyarakat penerima ganti rugi YIA sesuai dengan pola yang diprediksi melalui teori ekonomi dualistik, yang mana masih ada nilai-nilai kearifan lokal (sebagai prinsip tradisional) yang mempengaruhi tindakan ekonomi masyarakat. Tindakan ekonomi yang dibuat masyarakat tidaklah sepenuhnya rasional dengan prinsip-prinsip modern, tetapi tetap berbenturan dengan prinsip tradisional. Di satu sisi, masyarakat mengelola uangnya dengan prinsip modern, seperti dengan menginvestasikan uang yang diterima untuk mempertahankan aset. Tetapi, masih ada sebagian dari uang yang diterima yang dipinjamkan atau dibagikan kepada keluarga, menunjukkan pengaruh prinsip tradisional dalam pengelolaan uang.



Kesimpulan

Konsep *embeddedness* melihat perilaku ekonomi masyarakat sebagai interseksi antara tindakan rasional dan tindakan yang dipengaruhi struktur sosial secara situasional. Hal ini tampak dari bagaimana penerima ganti rugi YIA mengelola uang ganti rugi dan menanggapi konsep literasi keuangan. Pola pikir tradisional membuat masyarakat masih menerapkan nilai kearifan lokal dalam tindakan ekonomi sehingga apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya rasional dalam perspektif ekonomi modern. *Tuna satak bathi sanak* diterapkan melalui kemauan berbagi uang ganti rugi dengan kerabat sebagai ganti dari akumulasi modal. *Gemi, nastiti, dan ngati-ngati* yang juga merupakan nilai Jawa muncul dari perhitungan prioritas dalam pengeluaran rumah tangga. Pun jika masyarakat melakukan investasi, mereka mengaku memilih bentuk investasi yang sederhana dan mudah dipahami—berbeda dengan tren investasi belakangan ini. Benturan prinsip tradisional dan modern tersebut didorong dengan adanya pembangunan bandara yang merampas lahan produktif para masyarakat sehingga kehilangan opsi untuk meneruskan penerapan ekonomi tradisional yang dipengaruhi struktur sosial di lokasi mereka. Kehadiran sepihak infrastruktur baru tanpa mempertimbangkan kondisi sosial menjadi desakan bagi para masyarakat untuk beradaptasi dengan ekonomi rasional tanpa diberi topangan yang kuat oleh pemerintah. Masyarakat terdampak lantas meraba-raba sistem ekonomi kapitalisme dengan kearifan sosial yang memengaruhi tindakan mereka dalam roda ekonomi.

Catatan Kritis

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kearifan lokal masih melekat dalam tindakan ekonomi masyarakat, sehingga penting untuk mengintegrasikan hal tersebut ke dalam konsep literasi keuangan yang bersifat situasional. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa literasi keuangan yang diterima oleh masyarakat dapat relevan dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Adapun demikian, rekomendasi dari penelitian ini adalah:



1. Memfokuskan literasi keuangan pada masalah-masalah spesifik yang dialami masyarakat. Dengan memahami kondisi ini, maka dalam pendekatan kontekstual, fokus dari literasi keuangan yang diajarkan kepada masyarakat dapat dialihkan ke dalam materi yang paling relevan dengan keadaan masyarakat.
2. Memilih bentuk pengelolaan uang yang relevan dengan nalar masyarakat. Misalnya, bentuk investasi yang disarankan lebih baik berupa produk *low risk low return*, mempertimbangkan masyarakat yang tidak mengincar akumulasi modal. Produk investasi seperti ini memiliki risiko yang rendah dan secara umum lebih mudah dikelola. Produk investasi seperti deposito dapat menjadi pilihan yang ideal, mengingat proses pembukaan yang mudah, risiko yang sangat rendah, dan keuntungan yang terjamin.
3. Menerapkan nilai yang hadir dalam kehidupan masyarakat ke dalam materi literasi keuangan agar lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Penggunaan bahasa ataupun nilai yang lekat dan familiar bagi masyarakat dapat membantu mereka untuk memahami penjelasan yang disediakan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang bersedia untuk terlibat di dalam proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Afifi, Irfan. 2021. Wawancara oleh Langit G. M. Hartono, 22 Agustus.
- Afriani, Andri. 2018. "Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching And Learning) dan Pemahaman Konsep Siswa." *Jurnal Al-Muta'aliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1):80-88. Diakses pada 8 Agustus 2021 (<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/mutaaliyah/article/view/3005>)



- Az-Zahra, Yasmin F. dan Sigit, Agus. A. 2019. "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta." Diakses pada 25 Agustus 2021 (<http://eprints.ums.ac.id/73280/16/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>)
- Blikololong, J.B. 2012. "Evolusi Konsep Embeddedness dalam Sosiologi Ekonomi (Sebuah Review)". *UG Jurnal*, 6(12):23-29. Diakses pada 4 Desember 2021 (<https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/view/813>).
- Borg, Walter R. dan Gall, Meredith D. (1984). "Educational Research: An Introduction." *British Journal of Educational Studies*, 32(3):274-274.
- Elisabeth, Advenia. 2021. Gap Literasi Keuangan di Kota dan Desa Tinggi, OJK Ungkap Penyebabnya. Diakses pada 20 Agustus 2021 (<https://www.idxchannel.com/economics/gap-literasi-keuangan-di-kota-dan-desa-tinggi-ojk-ungkap-penyebabnya>)
- Fadli, Yogi Z. 2021. Wawancara oleh Salsabila N. Aini dan Chiquitha T. F. Sedjati, 14 Agustus.
- Fajarini, Ulfah. 2014. "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter." *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(2):123-130. Diakses pada 22 Agustus 2021 (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/sosio-fitk/article/view/1225>).
- Fianto, F. Prismayani, R. Wijaya, N. Miftahussururi. Hanifah, N. Nento, M. Akbari, Q. Adryansyah, N. 2017. Materi Pendukung Literasi Keuangan. Diakses tanggal 18 Agustus 2021 (<https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/wp-content/uploads/2017/10/literasi-FINANSIATL.pdf>).
- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Edisi ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Granovetter, Mark. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness". *American Journal of Sociology*, 91:3 (29 pages). Diakses pada 20 Agustus 2021 (<https://www.jstor.org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/2780199?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Economic+Action+and+Social+Structure+The+Problem+of+Embeddedness.+American+Journal+of+Sociology&searchUri=>).
- Granovetter, Mark dan Richard, Swedberg (Ed), 1992. *The Sociology of Economic Life*, Westview Press Inc. Boulder-San Fransisco-Oxford.



- Henchoz, Caroline. 2016, 'Sociological Perspective on Financial Literacy.' pp. 97-112. in *International Handbook of Financial Literacy*. Springer, Singapore.
- Hull, Dan. 1995. *Opening minds, opening doors*. Waco, Tex: CORDCCommunications.
- Insani, N. Hanifah. (2018). Sĕrat Nitimani: Pendidikan Seks berdasarkan Etika Jawa. *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra*, 11(1), 73-90.
- Lusardi, Annamaria. 2019. "Financial Literacy and the need for financial education: evidence and implications". *Swiss Journal of Economics and Statistics*. 155:1 (8 pages) Diakses pada 21 Agustus 2021 (<https://sjes.springeropen.com/articles/10.1186/s41937-019-0027-5>).
- Maharani, Shinta. 2020. "Pontang-Panting Setelah Tergusur Bandara Kulon Progo." *Tempo*. Diakses pada 8 Agustus 2021 (<https://nasional.tempo.co/read/1337812/pontang-panting-setelah-tergusur-bandara-kulon-progo>).
- Mulyadi, Mohammad. 2011. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. 15(1):127-138. Diakses pada 10 Agustus, 2021 (<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/150106>)
- Nawawi. 2012. Dakwah keluarga: internalisasi nilai-nilai budi pekerti dalam keluarga Jawa. *Ilmu dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. 6(2):285-311
- OECD. 2020. "OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy." OECD, 15-16. Diakses pada 13 Agustus 2021 (<https://www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm>).
- OJK. 2019. "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019." OJK. Diakses pada 30 Juli 2021 (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>).
- Pitoyo, Djoko. 2008. Tuna Satak Bathi Sanak (Kearifan Jawa dalam Etika Bisnis). *Jurnal Filsafat*. 18 (2):149
- Rudiana, Pito A. 2020. "Cerita Perempuan Korban Penggusuran YIA, Bersiasat demi Bertahan Hidup." Diakses pada 26 Agustus 2021 (<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/cerita-perempuan-korban-penggusuran-ya-bersiasat-demi-bertahan-hidup/3>).



- Sadli, Mohammad. 1971. Reflections on Boeke's Theory of Dualistic Economies. *The Economy of Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 1971)*, 99-123.
- Sartini, Sartini. 2021. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati". *Jurnal Filsafat*, 14(2):111-120. Diakses 5 Agustus 2021 (<https://philpapers.org/rec/SARMKL>).
- Susanto, Happy. 2020. "Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo." *Majalah Ilmiah Bijak*, 17(1):7-9. Diakses pada 7 Agustus 2021 (<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/bijak/article/view/820>).
- Watchdoc Image. 2015. "SAMIN VS SEMEN (full movie)." Diakses pada 26 Agustus 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=1fjuJ28WZ_Q).
- Widyastuti, Mamik. 2007. Citra Srikhandhi dalam Ceritera Mahabarata (Pencitraan Nilai-nilai Kewanitaan dalam Budaya Jawa). *Gelar: Jurnal Seni Budaya*. 5 (1):100.